

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



OLEH:

ISTI LATIFAH ASTRI

201610110311225

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



OLEH:

ISTI LATIFAH ASTRI

201610110311225

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Diajukan Oleh:

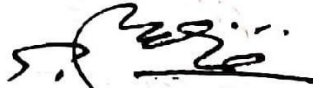
ISTI LATIFAH ASTRI

201610110311225

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

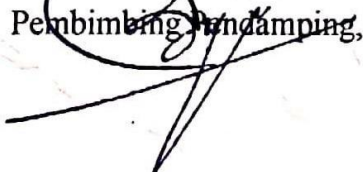
Pada, Jumat 13 Maret 2020

Pembimbing Utama,



Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Bayu Dwi Widdy J., SH., M.Hum
Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH., M.Hum



Dr. Tugat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

SKRIPSI

Disusun oleh:

ISTI LATIFAH ASTRI

201610110311225

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 13 Maret 2020

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

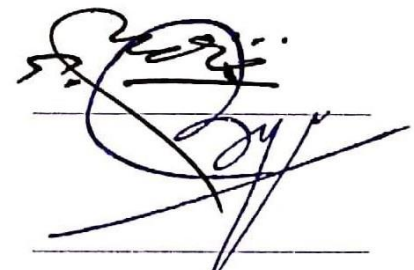
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

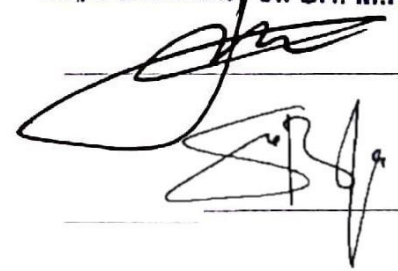
Sekretaris : Bayu Dwi Widdy Jatniko., SH, M.Hum

Penguji I : Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Penguji II : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.



Bayu Dwiwiddy J.. SH. M.Hum



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ISTI LATIFAH ASTRI

NIM : 201610110311225

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 23 April 2020



Isti Latifah Astri

UNGKAPAN PRIBADI

Kerja Keras,

Kerja Cerdas,

Kerja Ikhlas.

Lakukan sebisamu, hargai prosesmu dan banggakan dirimu.



Motto :

Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi.

– Henry Ford

ABSTRAKSI

Nama : Isti Latifah Astri
NIM : 201610110311225
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Pembimbing : Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum
Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum

Justice Collaborator merupakan istilah baru dalam proses peradilan pidana di Indonesia. *Justice Collaborator* adalah seorang tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Dalam konteks tindak pidana narkotika, *Justice Collaborator* memiliki peranan penting dalam mengungkap sindikat narkotika karena selama ini adanya kelemahan dalam sistem hukum pidana yang belum mampu mengungkap, melawan dan memberantas tindak pidana yang sifatnya terorganisir. Oleh karena itu *Justice Collaborator* berhak mendapat perlindungan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika serta kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika di masa mendatang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji hal ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif. Pada dasarnya pengaturan mengenai perlindungan *Justice Collaborator* di atur dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan untuk kewajiban di atur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun ketentuan tersebut memiliki beberapa kelemahan terutama bagi *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan formulasi hukum demi mendapatkan bentuk perlindungan hukum yang ideal sehingga asas kepastian hukum dapat terwujud.

Kata Kunci : Saksi, *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

Name : Isti Latifah Astri
NIM : 201610110311225
**Tittle : LEGAL PROTECTION OF JUSTICE
COLLABORATORS IN NARCOTICS CRIMES**
**Advicer : Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum
Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum**

Justice Collaborator is a new term in the criminal justice process in Indonesia. Justice Collaborator is a suspect, defendant or convict who can work together with law enforcement to uncover a particular crime. In the context of narcotics crime, Justice Collaborator has an important role in uncovering narcotics syndicates because so far there are weaknesses in the criminal law system that have not been able to uncover, fight and eradicate organized crime. Therefore Justice Collaborator has the right to get protection. The purpose of this study is to determine the rights and obligations of the Justice Collaborator for narcotics crime and the policy of formulating legal protection against Justice Collaborator for narcotics crime in the future. The research method used in assessing this is the normative juridical approach. Basically, the provisions concerning the protection of Justice Collaborator are regulated in Article 5 Paragraph (1), Article 10 and Article 10A of Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, while for obligations stipulated in Article 30 of Law Number 31 of Year 2014 concerning Witness and Victim Protection. However, this provision has several weaknesses, especially for the Justice Collaborator of narcotic crime. Therefore, a legal formulation policy is needed to obtain the ideal form of legal protection so that the principle of legal certainty can be realized.

Kata Kunci : Witness, Justice Collaborator, narcotics crime.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugrahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi berjudul. “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**”. Penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penulisan hukum atau skripsi ini tentunya penyusun mendapat banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga memberikan semangat bagi penulis. Kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Ayahanda Afrizal** dan **Ibunda Sawitri** selaku orang tua penulis yang selama ini telah berkorban secara moril maupun materil dan juga selalu mendoakan penulis agar mampu menyelesaikan studi dengan baik, hingga hari ini penulis mampu mencapai titik akhir sebagai mahasiswa yang akan mendapat gelar sarjana S-1 Sarjana Hukum; serta terimakasih untuk **Mutia Fadila Astri** dan **Nurul Hidayah Astri** selaku adik-adik penulis dan juga keluarga besar penulis atas kasih sayang lahir bathin, doa, dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Dr. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. (Wakil Dekan I), Dr. Haris, S.H., M.Hum (Wakil Dekan II), Said Noor Prasetyo, S.H., M.H (Wakil Dekan III) dan Kepala Laboratorium Fakultas Hukum, penulis ucapkan terimakasih karena selama ini selalu memberi motivasi bagi penulis;
4. Bapak Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum dan Bapak Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis. Terima kasih karena selalu sabar dalam memberikan wejangan wejangan, Terima kasih juga karna selalu memberi dorongan dan menyemangati penulis untuk rajin, tekun dan semangat dalam proses penulisan skripsi;
5. Bapak Mokh. Najih., S.H., M.Hum., Ph.D selaku dosen wali penulis yang banyak mendukung selama kuliah dalam mencapai tujuan;
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, kiranya telah banyak memberikan pengetahuan pada penulis, selama menimba ilmu di Fakultas Hukum;
7. Keluarga besar Lembaga Semi Otonom Pusat Kajian Keilmuan dan Keislaman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LSO PUKASH) Mas Tomy, Mas Eki, Mas Wahyu, Mas Dedy, Mbak Yayak,

Mbak Fani, Mbak Dewi, Mbak Ilmi, Mbak Dombat, Fauzah, Yustria, Risma, Ratu, Brian, Mirna, Satriyo, Ana, Pras, Tivani, Dianova, Samsi dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan, terimakasih telah menjadi keluarga pertama selama berada di Malang, terimakasih banyak atas pengalaman berharga selama penulis menempuh dan berhasil menyelesaikan studi;

8. Moh. Baris Siregar yang senantiasa menemani penulis dikala susah maupun senang selama meniti kehidupan kampus, selalu memberikan motivasi dan menjadi penyemangat penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
9. Sahabat penulis Adibah Oktavia yang telah menjadi teman sekaligus keluarga penulis semenjak pertama kali menjadi mahasiswa FH UMM, rekan organisasi, sahabat terbaik penulis selama ini;
10. Sahabat seperjuangan skripsi penulis Ifan Agung Saputra yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat SMA penulis Risma Sri Wahyuni, Fitri Wahyuni, Hadi Sunaryanto, Cindy Aprila, Della Indriyani, Zahraini Hasriani, terimakasih telah menjadi pendengar setia penulis menghadapi lika-liku kehidupan kampus;
12. Rekan-rekan penulis dari paralegal serta Bapak/Ibu Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang Raya (LBH PERADI Malang Raya) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan pengalaman yang luar biasa selama penulis menyelesaikan studi;
13. Rekan-rekan penulis dari Hukum Kelas D Angkatan 2016 terutama untuk Radika Cintya Matovani, Hany Krisna Priratna, Saesilia Woro Rengganis dan Eka Rahmawati;
14. Rekan-rekan penulis dari KKN Kelompok 115 terutama untuk Yaumil, Nurma, Dhea, Anggi, Ayu, Novha, Alfi, dan Ima;
15. Rekan-rekan penulis yang tergabung dalam Komunitas Riset dan Debat (KRD) Periode 2017-2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
16. Rekan-rekan penulis yang tergabung dalam Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI) khususnya para Dewan Pimpinan Pusat periode 2018-2020 yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan pengalaman sebagai Dewan Pimpinan Pusat bidang Penelitian dan Pengembangan periode 2018-2020;

17. Rekan-rekan penulis yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (BEM UMM) periode 2018-2019, yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan pengalaman sebagai staff di bidang Politik, Hukum dan HAM;
18. Dan seluruh pihak-pihak lain yang telah membantu dalam bentuk apapun, terimakasih.

Hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas semua dukungan dan doanya semoga Allah SWT., membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Aamiin.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin.

Penulis,

Isti Latifah Astri



DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Surat Pernyataan Tugas Akhir Bukan Plagiat	v
Ungkapan Pribadi/ <i>Motto</i>	vi
Abstraksi.....	vii
Abstract.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Rencana Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	17
3. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara.....	18
B. Tinjauan tentang Saksi	
1. Pengertian Saksi.....	19
2. Macam-Macam Saksi.....	20
3. Hak dan Kewajiban Saksi	25
4. Larangan Menjadi Saksi	26
5. Fungsi Kesaksian.....	27
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
3. Tindak Pidana Narkotika	
a. Pengertian Narkotika	30
b. Tindak Pidana Narkotika.....	31
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	31
D. Tinjauan tentang <i>Justice Collaborator</i>	
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	35
2. Sejarah <i>Justice Collaborator</i>	36
3. <i>Justice Collaborator</i> Sebagai Alat Bukti.....	39
4. Urgensi <i>Justice Collaborator</i> Dalam Membongkar Tindak Pidana Terorganisir	40

5. Syarat-Syarat <i>Justice Collaborator</i>	41
6. Prosedur Pengajuan <i>Justice Collaborator</i>	42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hak dan Kewajiban <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban	
1. Pengaturan Hak <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Narkotika	45
2. Pengaturan Kewajiban <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Narkotika	70
B. Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Tindak Pidana Narkotika di Masa Mendatang	
1. Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Tindak Pidana Narkotika di Masa Sekarang.....	74
2. Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Tindak Pidana Narkotika di Masa Mendatang	
a. Kebijakan Formulasi Mengenai Penetapan dan Syarat Sebagai <i>Justice Collaborator</i> Tindak Pidana Narkotika	75
b. Kebijakan Formulasi Dalam Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Tindak Pidana Narkotika	85
c. Kebijakan Formulasi Dalam Bentuk Pemberian Penghargaan Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Tindak Pidana Narkotika	86
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran-Saran	93
Daftar Pustaka.....	95
Index	100
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Perbedaan *Crown Witness* dan *Justice Collaborator*
2. Tabel 2. Hak-Hak *Justice Collaborator* Sebagai Bentuk Perlindungan Fisik dan Psikis
3. Tabel 3. Perbedaan Pemberian Hak-Hak Sebagai Bentuk Penanganan Khusus dan Pemberian Penghargaan Terhadap *Justice Collaborator*



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Indeks

Lampiran 2 : Surat Tugas

Lampiran 3 : Kartu Kendali Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Berita Acara Seminar



DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN LITERATUR :

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses.
- Anonim, 2011, *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*, Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana.
- Chazawi, Adami 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama.
- Kamisa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Terbaru)*, Surabaya, CV. Cahaya Agency.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011.
- Modul Azas-Azas Hukum Pidana untuk Diklat Pendahuluan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2010*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Moelyono, Anton M., 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balas Pustaka.
- Muhadar, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, CV. Putra Media Nusantara.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Najih, Mokhammad, 2014, *Politik Hukum Pidana : Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Malang, Setara Press.

Ochtorina, Dyah. A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. sinar Grafika. Jakarta 2014.

P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika.

Raharjo, Satjipto, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum.

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.53.

Reksodiputro, Mardjono, 2013, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.

Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Indonesia.

Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung, Mandar Maju.

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Siswanto S, 2004, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soedjono, 1997, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni Bandung.

Soekamto, Soerjono. Sri Mudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.* Jakarta. 2004.

Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Kencana.

Sumarsono, Siswanto, 2012, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Sinar Grafika.

Supramono, Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009.

Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press.

Wijaya, Firman, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku.

JURNAL DAN PENULISAN HUKUM :

Abdul Haris Semendawai, *Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Padjadjaran Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 3 Tahun 2016.

Anwar Ibrahim Aji, 2017, *Peringatan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Armia Pahmi, dkk, *Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dapat Bertindak Sebagai Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Proses Penegakan Hukum*, USU Law Journal, Volume 7 Nomor 1, Maret 2019.

Ayu Diah Pradnya dan Ni Nengah Adiyarni, *Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, diakses dalam ojs.unud.ac.id, pada tanggal 5 Februari 2020.

David Christian Sembiring, 2018, *Penerapan Justice Collaborator dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2011 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 231/Pid.Sus/2015/PN.PMS dan No.683/Pid.Sus/2016/PN.PBR)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Hariman Satriya, *Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis Justice Collaborator*, Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 2 Juni 2016.

Kadek Yolanda Zara Octaviany dan Ni Ketut Sri Utari, *Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organizes Crime di Indonesia Pada Masa Mendatang*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Maria Yudithia Bayu Hapsari, 2012, *Konsep dan Ketentuan mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia.

Nadya Octaviani Putri, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Ilmiah, Universitas Lampung.

Rahmi Dwi Sutanti, 2013, *Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Dalam Rangka*

Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sharistha Nathalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, Lex Crimen, Volume. II/No. 02, (April-Juni 2013).

Shoim Zainul Bahar, 2018, *Analisa Yuridis Penataan Ulang Syarat Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.

Sigit Artantojati, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Silvia Wulan Apriliani, *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Ungaran)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Wisnu Indaryanto, *Saksi Pelaku dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16 Nomor 4, Desember 2019.

INTERNET/WEBSITE :

Albert Aries, *Perbedaan Saksi Mahkota dan Justice Collaborator*, diakses dalam <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 12 Januari 2020.

Anandito Utomo, *Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota dan Alibi*, diakses dalam <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 1 Desember 2019.

Anandito Utomo, *Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota dan Alibi*, diakses dalam <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 1 Desember 2019.

Bakri, *Dapat Remisi, 16 Napi Narkoba Langsung Bebas*, diakses dalam <https://aceh.tribunnews.com>, pada tanggal 31 Oktober 2019.

BAS, *Memahami Lagi Aspek Pengaturan dan Implementasi Justice Collaborator*, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/>, pada tanggal 10 Januari 2020.

Desmond J. Mahesa, *Mengurai Beberapa Masalah Justice Collaborator dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, diakses dalam <https://akurat.co/>, pada tanggal 5 Februari 2020.

Detik News, *Ungkap Mafia Narkoba, Identitas Justice Collaborator Harusnya Ditutup*, diakses dalam <https://news.detik.com>, pada tanggal 3 Februari 2020.

Harits Tryan Akhmad, *Pentingnya Perlindungan Pada Justice Collaborator*, diakses dalam <https://nasional.okezone.com/>, pada tanggal 10 Januari 2020.

ICJR, *Problem dalam Implementasi bagi Justice Collaborator Indonesia Masih Ditemukan*, diakses dalam <https://icjr.or.id/>, pada tanggal 10 Januari 2020.

Kaltim Today, *UMKT Gelar Public Lecture, Soal Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*, diakses dalam <https://kaltimtoday.co>, pada tanggal 5 Februari 2020.

Nikolaus Tolen, *Syarat yang harus Dipenuhi Jika Ingin Jadi Justice Collaborator*, diakses dalam <https://www.law-justice.co/>, pada tanggal 5 Februari 2020.

Rahmi Dwi Sutanti dan Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Sebagai Alasan Peringanan Pidana Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, diakses dalam <https://media.neliti.com>, pada tanggal 17 Januari 2020.

Teguh Nirwahyudi, *Optimalkan Justice Collaborator di Pidana Narkotika*, diakses dalam <https://mediaindonesia.com>, pada tanggal 5 Februari 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (selanjutnya disebut Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama).

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : ISTI LATIFAH ASTRI

Nim : 201610110311225

Dengan Judul Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE
COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDAWA NARKOTIKA

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

23/ 20
14



Malang,

Nu'man Aunuh, SH., M.Hum